

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR DALAM
MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAYAK ANAK**

Fajar Rizki Aulia¹, Nurbeti, S.H, M.H,¹ Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H¹

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : rizkiauliafajar@gmail.com

ABSTRAK

Upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa perlakuan diskriminatif, salah satunya diwujudkan melalui kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan tahapan pengembangan KLA di Kabupaten Tanah Datar? 2) Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan kebijakan pengembangan KLA di Kabupaten Tanah Datar.? 3) Apa sajakah upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mengatasi masalah terkait pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan tahapan pengembangan KLA di Kabupaten Tanah Datar telah sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang diatur di dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2011 meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 2) Kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dalam pengembangan KLA adalah masih terbatasnya anggaran dalam pengembangan KLA, dan belum maksimalnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan KLA. 3) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan KLA yaitu memanfaatkan dana dari nagari, dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang KLA.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Kebijakan, Kabupaten Layak Anak